



# PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Rembang)

Rosa Maisyaroh, Haryanto<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +62895343967487

## ABSTRACT

*The samples in this study were heads of SKPD offices/agencies, secretaries of SKPD offices/agencies, and employees in the financial sector/treasurers at agencies/SKPDs throughout Rembang Regency. The sample is based on purposive sampling method. The samples obtained were 117 respondents. The research method used is hypothesis testing research using the SPSS 27 software test tools. The results show that the statement of government accounting standards has a significant effect on the quality of financial reports. This is also the same as the second variable that Good Governance and Clean Government also affects the quality of financial reports to obtain a positive and significant value. As well as the application of government accounting standards, Good Governance and Clean Government affect the quality of financial reports to obtain a positive and significant value.*

*Keywords: Government Accounting Standards, Good Governance and Clean Government, and The Quality of SKPD Financial Report*

## PENDAHULUAN

Tata kelola pengelolaan pemerintahan yang baik juga jujur atau *good governance and Clean Government* di Indonesia diperlukan sebuah kekuatan baik kekuatan secara sistem maupun kelembagaan yang sesuai dengan pemberlakuan peraturan dalam usaha untuk mencapainya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 23 C diperlukan penjabaran atas aturan pokok yang terdiri dari berbagai konsep kelola keuangan negara secara luas, yakni asas tahunan, asas umum, asas kesatuan dan asas khusus yang berkaitan dengan keuangan negara.

Sebuah dokumen yang menguraikan kondisi keuangan dan transaksi entitas pelaporan secara terstruktur dan berfungsi sebagai alat akuntabilitas keuangan daerah sekaligus sebagai sarana pemenuhan tugas akuntabilitas publik dan mengukur kinerja pemerintah daerah disebut laporan keuangan, Jamanson Sinaga (2005). Penyajiannya dilakukan sesuai dengan persyaratan standar akuntansi pemerintah di Indonesia.

Menurut Apriyono (2010), selain tanggap dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN, kondisi implementasi serta pelaksanaan tanggungjawab merupakan sebuah perwujudan dari tata kelola yang baik. Di Indonesia sendiri hal tersebut belum terlaksana dengan baik karena masih maraknya kasus korupsi baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPK, instansi yang paling dominan terjadi tindak pidana korupsi pada tahun 2019, 2020 dan 2021 berurutan berasal dari pemerintah kabupaten/ kota. Kemudian 3 posisi teratas diduduki oleh wilayah Pulau Jawa yakni Jawa Timur sebagai penyumbang utama kasus korupsi kemudian Jawa Barat dan disusul Jawa Tengah. Tahun 2014 KPK menetapkan Salim selaku mantan Bupati Rembang sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp 4,3 miliar.

Tata pengelolaan pemerintah yang baik serta bersih adalah sebuah tanda berhasilnya pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk membangun daerah berdasarkan maksud dan visi yang telah ditetapkan. Agar visinya tercapai pemerintah diharapkan mampu dalam hal mengelola keuangannya sendiri. . Dalam hal ini pemerintah harus membangun birokrasi yang transparan. Transparansi juga diperlukan untuk mencapai akuntabilitas. Keuangan daerah akan menderita jika akuntabilitas keuangan daerah tidak diimbangi dengan transparansi.

Sebuah penyelenggaraan pada keuangan di daerah perlu ditata dengan baik, memiliki keterbukaan dan tanggung jawab jika ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai bagian dari inisiatif untuk mendorong penataan pengelolaan pemerintah yang baik juga bersih, pemerintah pada lingkup daerah diberi kewajiban untuk membuat susunan dan sajian sebuah Laporan Keuangan di pemerintah daerah.

Bersumber atas hasil dari kajian Azlim et al. (2012), bahwasanya penataan pengelolaan yang baik harus diterapkan dengan menggunakan konsep manajemen yang baik pula seperti adanya keterbukaan dan akuntabilitas untuk pedoman dalam menyediakan pelaporan keuangan yang bermutu. Tentunya sejalan dengan Pemerintahan yang terbuka dan bersih dari praktik KKN, berdasar pada UU No 28 Tahun 1999.

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah, *good governance and clean government* yang baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### ***Agency Theory***

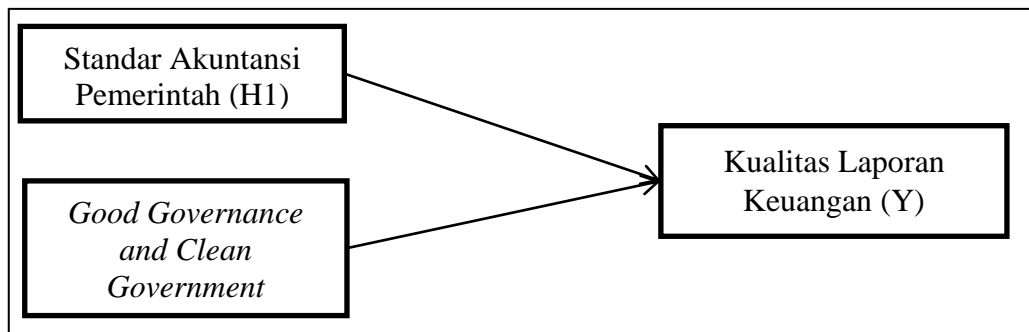
Riset ini menggunakan teori agensi yang mana berdasar pada *Agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

Dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat), Mardiasmo (2002).

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**



### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pada dasarnya, standar akuntansi di pemerintahan terkait dengan keakuratan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah standar yang diikuti oleh lembaga pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan mutunya sebuah laporan suatu keuangan. Landasan dari setiap sistem akuntansi di pemerintahan yang efektif yakni mudah dipahami dan tingginya kualitas pada laporan keuangan tersebut. Akibatnya, ketika membuat laporan keuangan berkualitas tinggi standar akuntansi tata kelola yang baik harus dipatuhi. Hal tersebut didukung oleh penelitian Purwaniati Nugraheni (2008), terdapat pengaruh positif penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Itjen Depdiknas terhadap meningkatnya laporan keuangan yang berkualitas pada Inspektorat Jenderal Depdiknas. Selain itu, Maya Angelicca (2019) menemukan bahwasanya kualitas pelaporan keuangannya pada pemerintah Kabupaten Lamandau meningkat dengan diterapkannya dasar akuntansi di pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

### **Pengaruh Good Governance and Clean Government terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam penerapan *Good Governance and Clean Governance* memiliki beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai dasar penilaian yang diinginkan yaitu Partisipasi, *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban). Apabila suatu pemerintahan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, bersih dan berwibawa baik dari segi kepegawaian, susunan organisasi maupun fungsinya maka dikatakan menjalankan *Good Governance and Clean Governance*. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Indrawati (2012) bahwa kelola keuangan yang berlandaskan tata pemerintahan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang memiliki dasar yang kuat, akuntabel, efisien dan efektif serta ditangani secara partisipatif. Serta penelitian Amanda Thea Hosana, Rispantyo dan Bambang Widarno (2022) yang mana *good governance* dimana tata kelola yang kuat mampu memberi dampak menguntungkan dan lumayan banyak bagi mutunya laporan pada keuangan. Menurut hasil penelitian sebelumnya, temuan hipotesis adalah:

H2: *Good Governance and Clean Government* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi pada riset ini yaitu seluruh kepala dinas/badan, sekretaris dinas/badan, dan peawai bidang keuangan pada dinas/badan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala dinas/badan, sekretaris dinas/badan, dan peawai bidang keuangan pada dinas/badan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebesar 129 responden, namun ada beberapa responden yang tidak berkenan mengisi kuesioner sehingga sampel penelitian ini berjumlah 117 responden. Sampel ini diambil dengan metode purposive sampling, yang mana strategi pengambilan sampel yang memasukkan kriteria atau pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2014). Jenis data dalam riset ini bersifat data kuantitatif dengan metode pengumpulan data bersumber pada data primer yaitu kuesioner.

### Variabel Penelitian

Penelitian independen dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah dan *good governance and clean government*. Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Ringkasan dari definisi operasional variabel dependen dan independen tertera pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
Standar Akuntansi Pemerintah	Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, Realisasi, Substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsisten pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar (UU No 71 Tahun 2010).	1. Basis Akuntansi 2. Penyajian Wajar 3. Nilai Historis 4. Konsistensi 5. Realisasi 6. Substansi Mengungguli Bentuk Formal 7. Pengungkapan Lengkap 8. Periodisitas  (Haryanto, 2018)	Skala Ordinal 1-5
<i>Good Governance and Clean Government</i>	Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administrative (Mardiasmo, 2018).	1. <i>Rule of Law</i> 2. <i>Participation</i> 3. <i>Responsiveness</i> 4. <i>Transparency</i> 5. <i>Equity</i> 6. <i>Consensus Orientation</i> 7. <i>Accountability</i> 8. <i>Efficiency and Efectiveness</i> 9. <i>Strategic Vision</i>	Skala Ordinal 1-5

Kualitas Laporan Keuangan	Laporan keuangan yang menyajikan data keuangan organisasi pemerintah dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat yang akan menggunakannya untuk penyelesaian kewajiban dalam pengelolaan keuangan.	a. Andal b. Relevan c. Mudah dipahami d. Mudah dibandingkan  (Haryanto, 2018)	Skala Ordinal 1-5
---------------------------	--	--	-------------------

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Jumlah sampel penelitian ini adalah 129 orang. Namun yang bersedia mengisi hanya 117 responden. Pengambilan kuesioner ini dikirimkan ke setiap Organisasi Pemerintah Daerah baik dikirim secara langsung ke kantor maupun tidak langsung. Dari hasil pengisian kuesioner tersebut, mayoritas yang mengisi adalah perempuan berjumlah 51 orang (48%) serta mayoritas usia responden dengan usia 41-50 tahun berjumlah 35 orang (30%). Kemudian mayoritas yang mengisi memiliki tingkat pendidikan lulusan S1 berjumlah 76 orang (65%). Selanjutnya mayoritas lama bekerja yang dimiliki responden adalah >5 tahun berjumlah 94 orang (80%).

### Uji Instrumen Data

#### Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid tidaknya pernyataan. Penelitian ini memakai  $r$  tabel sebesar 0,1816 yang diperoleh melalui nilai sig 0,05 serta jumlah sampel ( $n$ ) sebesar 117. Pernyataan pada kuesioner ini dinyatakan valid jika hasil  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	R Hitung Rata-rata	R Tabel	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah	0,614	0,1816	Valid
Good Governance and Clean Government	0,548	0,1816	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	0,658	0,1816	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel diatas, semua  $r$  hitung rata-rata pada setiap variabel dalam penelitian ini berada diatas  $r$  tabel (0,1816), sehingga variabel standar akuntansi pemerintah, good governance and clean government dan kualitas laporan keuangan ini dinyatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat keandalan suatu kuesioner dari variabel penelitian yang digunakan. Pada uji reliabilitas penelitian ini diukur menggunakan *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ).

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Standard Alpha	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah	0,765	0,60	Reliabel

Good Governance and Clean Government	0,821	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,813	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas dari ketiga variabel penelitian. Dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,6. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kuesioner penelitian ini adalah reliabel.

### Statistik Deskriptif

**Tabel 4**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Median	Standar Deviasi
Standar Akuntansi Pemerintahan	117	24.00	40.00	35.2308	36.00	2.70499
<i>Good Governance and Clean Government</i>	117	52.00	70.00	64.4444	64.00	4.09045
Kualitas Laporan Keuangan	117	24.00	40.00	35.7094	36.00	2.83774

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasar tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa variabel X1 yaitu SAP dengan jumlah 8 pertanyaan di dalam kuesioner memiliki nilai rata-rata (mean) mempunyai nilai antara 24 hingga 40 dengan jumlah rata-rata (mean) sebanyak 35,2308 dan standar deviasinya 2,70499. Berdasarkan hasil tersebut nilai mean lebih kecil daripada mediannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa efektivitas laporan keuangan tidak banyak dipengaruhi oleh aturan akuntansi pemerintahan.

Untuk variabel *Good Governance and Clean Government* mempunyai nilai minimal 52 dan maksimal 70 dengan jumlah rata-rata (mean) sebanyak 64,4444 dan standar deviasinya 4,09045. Berdasarkan hasil tersebut nilai mean lebih besar daripada mediannya. Sehingga dapat diketahui bahwa *Good Governance and Clean Government* memberikan pengaruh pada laporan keuangan yang bermutu.

Sedangkan variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai kisaran 24 – 40 dengan mean 35,7094 dan mediannya 36,0000. Berdasarkan hal tersebut nilai rata-rata mendekati nilai mediannya. Sehingga dapat diketahui bahwa secara garis besar laporan keuangan pemerintah Kabupaten Rembang cukup berkualitas.

### Uji Statistik t (Uji t)

Uji t dipakai untuk memberi informasi seberapa besar variabel independen membantu menjelaskan variabel dependen. Variabel independen memiliki keterkaitan secara parsial pada variabel dependen apabila signifikansinya < dari 0,05. Namun, apabila ambang signifikansi > 0,05, variabel independen memiliki keterkaitan yang kecil pada variabel dependen (Ghozali, 2018).

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Statistik t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.886	2.719		4.740	.000
	X1	.648	.077	.618	8.419	.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Signifikansi keterkaitan SAP (X1) pada laporan keuangan yang bermutu dinilai dengan menggunakan uji t atau uji parsial (Y). Uji T digunakan karena ada 117 orang dalam sampel. Dihasilkan tabel T sebesar 1,98099 dengan derajat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% atau 0,05. Nilai signifikansi SAP (X1) terhadap laporan keuangan yang bermutu (Y) adalah  $0,000 < 0,05$  sesuai dengan hasil uji t (parsial) dan nilai t adalah  $8,419 > 1,98099$ . Maka H1, tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi di pemerintahan berdampak pada keakuratan laporan keuangan yang diterima atau hipotesis yang diajukan pada BAB II sebelumnya diterima. Maka, **Hipotesis 1 diterima**.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.895	2.912		3.055	.003
	X2	.435	.047	.652	9.231	.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Uji t atau uji parsial digunakan untuk mengetahui signifikansi keterkaitan antara *good governance dan clean government* (X2) pada mutunya laporan keuangan (Y). Uji T digunakan dengan ambang signifikansi 5% atau 0,05 sehingga hasil dari T tabel sebesar 1,98099. Bersumber hasil uji t parsial pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikan *Good Governance and Clean Government* (X2) terhadap laporan keuangan yang bermutu (Y) sebesar  $0,000 < 0,05$ , dan nilai t sebesar  $9,231 > 1,98099$ . Artinya terdapat pengaruh *Good Governance and Clean Government* terhadap laporan keuangan yang bermutu. Maka, **Hipotesis 2 diterima**

### Uji Statistik Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mendapatkan informasi terkait signifikansi keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersamaan. Semua variabel bebas mempunyai pengaruh pada variabel terikat jika signifikansi uji  $< 0,05$ . Jika ambang signifikansi  $> 0,05$  maka variabel independen tidak memiliki keterkaitan secara simultan pada variabel dependen.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Statistik Simultan (Uji F)**  
**ANOVA**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	445,212	2	222,606	51,906	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	488,908	114	4,289		
	Total	934,120	116			

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil uji F sebesar  $51,90 > 3,08$ , dan nilai signifikansi pengaruh SAP (X1) dan *good governance and clean government* (X2) pada mutunya laporan keuangan (Y) dengan jumlah  $0,000 < 0,05$ .

### Interpretasi Hasil

#### Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil dari pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diuji menggunakan uji t-statistik. Uji statistik t dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Pengujian ini dilakukan dengan kriteria apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima dan apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak. Laporan keuangan yang bermutu, sesuai hasil perhitungan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penggunaan standar akuntansi pemerintahan. Hasil ini dapat dilihat dengan melihat hasil uji t-statistik yang lebih besar dari 1,98099 atau 8,419. Akibatnya, hipotesis 1 dapat dianggap valid. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman akuntansi yang digunakan untuk pembuatan dan penyajian catatan pada keuangan di sektor pemerintah sesuai PP Nomer 71 Tahun 2010. Negara-negara pengguna standar akuntansi pemerintahan juga harus meningkatkan kualitas data pelaporan keuangan, membuat metrik kinerja yang lebih baik dan memungkinkan lebih transparan dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Efektivitas laporan keuangan yang dihasilkan tergantung pada seberapa baik kewajiban pelaporan akuntabilitas keuangan daerah dipenuhi. Hal tersebut sejalan pada temuan Permana (2011) yang menemukan yakni SAP berpengaruh besar terhadap kualitas informasi pemerintah daerah pada pelayanan Kota Bandung.

#### Pengaruh Good Governance and Clean Government terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ghozali (2018), dengan menggunakan nilai t apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima dan apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan pada uji t-statistic dapat diperoleh informasi bahwa *Good Governance and Clean Government* memiliki pengaruh positif mempengaruhi keakuratan laporan keuangan. Dengan mengetahui nilai yang lebih tinggi dari uji t-statistik yakni 9,231 dan dari nilai 1,98099. Dengan demikian, dapat dikatakan



bahwasanya hipotesis 2 dapat diterima. Hal tersebut memberikan bukti bahwa penerapan *Good Governance and Clean Government* dalam BPPKAD Kabupaten Rembang memberikan kontribusi dan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat. Hal tersebut sesuai pada hasil temuan Milik Oktariana Mia (2016) yang menyatakan bahwa *clean government and good governance* memiliki keterkaitan atas mutunya pelaporan keuangan.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data di atas, kedua variabel independent yakni variable standar akuntansi pemerintah dan variable *good governance and clean government* secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Rembang.

### Keterbatasan

Faktor berikut menjelaskan sebagian keterbatasan penelitian:

1. Tidak dapat melihat responden mengisi kuesioner, karena peneliti tidak dapat memverifikasi apakah kuesioner telah diisi sesuai dengan sampel yang diperlukan.
2. Hanya 3 sampel dari masing-masing SKPD yang digunakan sebagai sampel dalam investigasi ini.
3. Banyaknya instansi yang harus didatangi di setiap SKPD di Kabupaten Rembang menyebabkan lamanya proses pendistribusian kuesioner.
4. Metode pengumpulan data yang hanya bersumber dari pengisian kuesioner saja.

### Saran

Berdasarkan dengan keterbatasan di atas, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memastikan bahwa kuesioner diisi oleh responden sesuai dengan sampel yang diperlukan, dan juga memperluas jaringan sampel yang tidak hanya lingkup kabupaten namun sampai provinsi. Selain itu juga dapat menggunakan instrument penelitian lain seperti wawancara dengan tujuan dengan maksud mempelajari fakta-fakta yang lebih mendalam mengenai masalah penelitian. Dan agar hasil penelitian lebih akurat maka peneliti dapat menambahkan banyak literature, objek penelitian yang luas dan teknik pengolahan data yang canggih.

## REFERENSI

- Indrawani. 2012. *Prinsip good financial governance dalam pengelolaan keuangan Negara dalam rangka mewujudkan clean governance*. (Vol: XVII No. 3 Tahun 2012). Universitas Airlangga.
- Arifuddin dan Haryanto. 2018. *Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi* (Edisi 1). Cetakan ke 1. Semarang: Undip Press
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Oktarina, Mia. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Dan Good Governance 53 54 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kota Semarang Tahun 2014)*. Journal Of Accounting (Vol : 2 No. 2 Tahun 2016). Universitas Pandanaran Semarang.



- Intihanah & Nur Afifa Muthia S. 2017. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Kendari)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, fokusmedia, Bandung.
- Prantama, Noor Alyda, dkk. 2015. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Real Estate & Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011- 2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis (Vol: 1 No. 2 Tahun 2015). Universitas Brawijaya.
- Sinaga, Jamanson. 2005. *Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 1, No. 2 Hal 1-8.
- Azlim, dkk. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh*. ISSN 2302 – 0164, Volume 1, No. 1. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Nugraheni, P. dan Subaweh, I. (2008). *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis, 13(1).
- Angelicca, Maya (2019) *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah ( studi di pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah )*. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
- Albugis, F. (2016). *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah* . EMBA ((Vol. 4 No.3 September 2016). Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Hosana, T. A., Rispantyo, R., & Widarno, B. (2022). *Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Karanganyar)*. JASTI.
- Patmawati. (2014). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan di Provinsi Sul-Sel*. 51-52.
- Selvi, & Patra, D. A. (2016). *Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan*.
- Zeyn, E. (Juni 2011). *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan*. Trikonomika Volume 10, No 1, 52-62.